

SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA AMERIKA SERIKAT

Abdul Wahab Syakhrani*

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

aws.kandangan@gmail.com

Al Hidayatullah

STAI RAKHA Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

M. Azhar

STAI RAKHA Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Muhammad Zulkifli

STAI RAKHA Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

Fajar Asshadiqi

STAI RAKHA Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

ABSTRACT

The United States of America which is the third largest country in the world certainly has a quality education system, many of the American universities are able to provide quality human resources in the world of work and education. in carrying out the educational process, as with the United States which gives more freedom to the states to implement the education system, while the central government only formulates big things in education. Basic education in the three countries has differences in the minimum age limit for entering primary school. In addition, the order of the education systems of the three countries is also different, as well as the level and type of education. As for the curriculum, in Indonesia the curriculum is described in a centralized curriculum structure, and basic education is given 10 subjects but has not been added with local content. In Japan, the basic education curriculum is based on cultivating character and independence, while general science lessons are only 4 subjects. Meanwhile, in the United States, the basic education curriculum teaches more soft skills and general subjects, totaling 4 subjects and then lowering them into sharpening sub-subjects.

Keywords: Education System, United States of America

ABSTRAK

Negara Amerika Serikat yang merupakan negara terbesar ketiga di dunia tentu memiliki sistem pendidikan yang berkualitas, banyak dari perguruan tinggi amerika yang mampu memberikan psdm yang berkualitas di dunia kerja maupun pendidikan. dalam menjalankan proses pendidikan, halnya dengan Amerika Serikat yang lebih

memberikan kebebasan Negara bagian untuk melaksanakan system pendidikan, sementara pemerintah pusat hanya merumuskan hal yang besar dalam pendidikan. Pendidikan dasar di tiga Negara memiliki perbedaan pada batasan usia minimum masuk sekolah dasar. Selain itu urutan system pendidikan ketiga Negara juga berbeda, serta jenjang dan jenis pendidikannya. Adapun dalam kurikulum, di Indonesia kurikulum dijabarkan dalam struktur kurikulum yang terpusat, dan pendidikan dasar diberikan 10 mata pelajaran belum ditambahkan dengan muatan local. Di Jepang, kurikulum pendidikan dasar didasarkan pada penanaman karakter dan kemandirian, sementara pelajaran ilmu pengetahuan umum hanya 4 mata pelajaran saja. Sementara di Amerika Serikat kurikulum pendidikan dasar lebih banyak mengajarkan softskill dan mata pelajaran umum yang berjumlah 4 mata pelajaran dan kemudian diturunkan dalam sub mata pelajaran yang bersifat penajaman.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Amerika Serikat

PENDAHULUAN

Sudah banyak contohnya bahwa pendidikan mampu membawa perubahan dalam berbagai aspek. Entah itu dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan tentu saja dalam penguasaan wawasan keilmuan. Jepang adalah salah satu negara yang sukses menjadi bangsa yang besar dalam hal pendidikan dan pengetahuan dengan mengirim generasi mudanya sekolah di luar negeri. Dari negeri matahari terbit ini telah ditunjukkan bagaimana meluasnya pendidikan secara cepat mampu membantu terjadinya modernisasi Jepang. Negara ini dalam kenyataannya mempunyai peraturan wajib belajar di seluruh negeri dan sudah menjadi nomor dua sesudah Amerika dalam hal jumlah siswa yang menerima pendidikan tinggi.

Bagaimana dengan Amerika Serikat? Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya ketika College-college sebagai dasar pendidikan Amerika didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada masa-masa awal, rakyat di seluruh koloni sudah sadar bahwa yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika. Hal ini terus berlanjut pada masa kolonial, diteruskan dan semakin disempurnakan pada masa-masa berikutnya sampai sekarang.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto dkk., 2021); (Nugraha dkk., 2021); (Sudarmo dkk., 2021); (Hutagaluh dkk., 2020); (Aslan, 2017a); (Aslan, 2019); (Aslan, 2016); (Aslan dkk., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Negara Amerika Serikat

Negara Amerika dikatakan sebagai Negara yang berpenduduk nomor tiga dunia dengan banyaknya penduduk sekitar \pm 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 Negara bagian. Luas daerahnya sekitar \pm 9,4 juta km² dan mempunyai variasi yang beragam yang terlihat dari keadaan flora dan faunannya beragam. (Agustiar Syah Nur, 2001).

Keturunan dari penduduk Amerika berasal dari keturunan Imigran Eropa, misalnya dari Jerman, Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Italia. Sepertiga penduduknya adalah orang Asia-Amerika yang mendiami pesisir barat. Sementara penduduk aslinya disebut penduduk Amerika/Indian. Sedangkan penduduk dari Eksimo sangat sedikit. Agama dari Amerika terdiri dari Kristen, Protestan, Katolik, Yudaisme, Islam, Buddha, Agnostik, Ateis, Hindu dan Universalis Unitarian.

Perkembangan Ekonomi yang ada di Amerika mengikuti pola kapitalis dalam arti usaha bebas. Bagi masyarakat Amerika mempunyai usaha swasta sangat mendukung bagi pertumbuhan ekonomi Amerika. Dalam bidang ekspor-import Amerika sangat terkenal baik dalam bahan mentah, misalnya kayu, karet, bahan tambang, mineral, sampai minyak tanah. (Abdur Rahman Assegaf, 2003). Usaha dari usaha export ini sangat menunjang juga dalam perekonomian Amerika.

Pada umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu Negara cenderung dijadikan alat intervensi negara kepada warga negaranya. Bentuk intervensi itu dapat berupa justifikasi (diakui/tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabatan). Pada tataran pendidikan tertentu biasanya akan lebih mudah untuk dilaksanakan intervensi tersebut. Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi) yang ada, umumnya Negara lebih memilih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Hampir tidak ada negara yang menaruh perhatian cukup besar pada pendidikan untuk orang-orang dewasa.

Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi intervensi pemerintah pada sektor pendidikan itu ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sector pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu Negara pelopor demokrasi. Sudah sejak lama kebijakan pendidikan di Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, dimana Pemerintah Pusat AS mengintervensi kebijakan pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, membantu sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus

untuk menempuh pendidikan lanjutan, menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung (karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung) kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium. Namun semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan, intervensi Pemerintah Pusat AS terhadap pendidikan mulai dikurangi. Hal ini terungkap dalam kepercayaan Reagan bahwa pemerintah terlalu mencampuri kehidupan masyarakat. Ia ingin mengurangi program-program yang menurutnya tidak dibutuhkan rakyat dengan menghapus "pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan." Selanjutnya tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan.

Sistem Pendidikan di Amerika Serikat

Dalam sistem pendidikan Amerika Serikat, terdapat beberapa pola struktur pendidikan, baik pada tingkat dasar dan menengah, maupun pada tingkat pendidikan tinggi. Pada tingkat dasar dan menengah terdapat pola (Agustiar Syah Nur: 2001, 15) sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak + Pendidikan Dasar "grade" 1-8 + 4 tahun SLTA.
2. Taman Kanak-Kanak + Sekolah Dasar grade 1-6+3 tahun SLTP+3 tahun SLTA.
3. Taman Kanak-Kanak + Sekolah Dasar "grade" 1-4/5+ 4 tahun SLTP + 4 tahun SLTA
4. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman Kanak-Kanak + 12 tahun, pada beberapa buah Negara bagian, dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi (Junior/Community Collage) sebagai bagian dari system pendidikan dasar menengah.

Amerika menerapkan model pendidikan yang berbeda dengan negara-negara persemakmuran Inggris, hal ini dikarenakan Amerika mencoba melakukan pendekatan *humanity perspective*. Hal urusan pendidikan diurus oleh Department of Education/Kementrian Pendidikan. Departemen of Education berkedudukan di ibu kota negara/Washington DC hanya sebagai pengendali umum saja. Sementara kebijakan ada pada department of Education di setiap negara bagian. Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi seluruh siswa di Amerika Serikat, akan tetap jenjang usia siswa berbeda-beda di setiap Negara bagian. Siswa di Amerika Serikat memulai pendidikannya dari jenjang Kindergarten (usia 5 sampai 6 tahun) hingga menyelesaikan pendidikan menengah pada kelas 12 (usia 18 tahun). Terdapat 14.000 sekolah di Amerika Serikat dan setiap tahunnya pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana pendidikan sebesar \$500 triliun untuk digunakan keperluan sekolah dasar dan menengah. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari Kindergarten hingga Fithh grade (Kelas 5), tetapi terkadang juga berjenjang

hingga Fourth grade (kelas 4), Sixth grade (kelas 6) atau eighth grade (kelas 8) tergantung sistem kurikulum pada school district tersebut.

Tujuan Pendidikan Amerika Serikat

Sistem pendidikan di Amerika Serikat (AS) mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian (states). Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah departemen pendidikan pemerintah federal di Washington D.C, namun kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap Negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada Kantor Pendidikan Distrik (Public School District), dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas.

Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa karakteristik utama politik sistem pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut: 1) Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman; 2) untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi; 3) untuk membantu pengembangan individu; 4) untuk memperbaiki kondisi social masyarakat; dan 5) untuk mempercepat kemajuan nasional.

Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal, dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi.

Manajemen Pendidikan Amerika Serikat

Manajemen pendidikan di AS dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Negara Bagian dan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat AS adalah Negara dengan system desentralisasi. Di tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah federal dalam sektor pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja.

Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan kebijakan serta

menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah (Negara Bagian) nya, khususnya berkenaan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai commissioner, sering juga disebut sebagai superintendent Bagian ini dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur.

Untuk beberapa Negara Bagian, pimpinan Bagian Pendidikan ini dipilih oleh masyarakat ada. Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan. Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, manajemen pendidikan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Negara-Negara Bagian memisahkan antara Badan yang memberi izin pendirian Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan. Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan untuk pendidikan Tinggi adalah board of trustees. Untuk Perguruan Tinggi Negeri anggota badan tersebut ditunjuk oleh Gubernur Negara Bagian. Ada juga yang dipilih dari dan oleh kelompok yang akan diwakili. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta anggota badan tersebut dipilih dari perguruan tinggi masing-masing.

Reformasi Pendidikan Amerika Serikat

Karena adanya berbagai permasalahan tersebut, pemerintah AS sejak tahun 1990 mencanangkan reformasi pendidikan. Nampaknya George Bush masih melanjutkan kebijakan Reagan bahwa terdapat industri swasta serta pemerintah local dan Negara bagian turut menanggung biaya kebijakan pemerintah. Pada tahun tersebut Presiden AS George H. B. Bush beserta seluruh Gubernur Negara Bagian (saat itu Bill Clinton termasuk menjadi salah satu Gubernur Negara Bagian) menyetujui reformasi pendidikan dengan mencanangkan 6 tujuan nasional pendidikan AS yang baru. Yaitu:

1. Pada tahun 2000, seluruh anak di AS di waktu mulai masuk sekolah dasar sudah siap untuk belajar.
2. Pada tahun 2000, tamatan sekolah menengah naik sekurang-kurangnya 90%.
3. Pada tahun 2000, murid-murid di AS yang menyelesaikan pendidikannya pada "grade 48 dan 12" mampu menunjukkan kemampuannya dalam mata pelajaran yang menantang, yaitu bahasa inggris, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Setiap sekolah di AS harus mampu menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan pikirannya dengan baik, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang baik, siap untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, serta siap pula untuk pekerjaan yang produktif dalam perekonomian modern.
4. Pada tahun 2000, siswa-siswa AS adalah yang terbaik di dunia dalam bidang sains dan matematika.

5. Pada tahun 2000, setiap orang dewasa AS dapat membaca dan menulis, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam ekonomi global, serta dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
6. Pada tahun 2000, setiap sekolah di AS harus bebas dari obat-obat terlarang dan kekerasan, serta dapat menciptakan suasana lingkungan yang mantap dan aman sehingga kondusif untuk belajar.

Pokok-pokok reformasi tersebut dimaksudkan sebagai pegangan dalam membuat kebijakan-kebijakan pendidikan yang sudah harus segera diimplementasikan dan hasilnya sudah harus kelihatan pada tahun 2000. Dan memang itulah yang terjadi di AS. Pokok-pokok reformasi pendidikan itu akhirnya ditindak lanjuti dengan berbagai kreasi kebijakan pendidikan di tingkat negara bagian dan pemerintah daerah. Gerakan reformasi pendidikan di kalangan Gubernur itu dipelopori oleh Gubernur Bill Clinton dan Lamar Alexander di masing-masing negara bagiannya. Gebrakan yang dilakukan adalah: 1) Meningkatkan persyaratan untuk menamatkan suatu jenjang Pendidikan; 2) Melaksanakan test standar untuk mengukur keberhasilan siswa; 3) Menjalankan sistem penilaian yang ketat terhadap guru sejalan dengan pembenahan jenjang karir bagi guru-guru; 4) Memperbesar tambahan dana dari negara bagian bagi sekolah sekolah. Tambahan dana baru ini pada umumnya dipakai untuk meningkatkan gaji guru yang kala itu masih berada pada taraf sangat rendah.

Akhirnya Amerika Serikat benar-benar memperoleh kemajuan di bidang pendidikan, sehingga ketika Bill Clinton menjadi Presiden AS, keberhasilan AS dalam mengembangkan kebijakan pendidikan mendapat perhatian khusus.

Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia pola pendidikan saat ini mengalami banyak perubahan dari semenjak adanya reformasi tahun 1998. System pendidikan tidak lagi terpusat atau desentralisasi, semenjak masuknya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan otonomi pendidikan, maka setiap satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk menentukan pola pendidikan yang akan diterapkan, meskipun hal ini belum sepenuhnya terlaksana, terutama di sekolah negeri. Adapun di sekolah swasta di Indonesia sudah mulai melakukan pengembangan sekolah dengan lebih baik, bahkan sudah melakukan perluasan kerjasama dengan berbagai Negara. Saat ini baik sekolah negeri maupun swasta hampir memiliki kualitas pendidikan yang sama, dan masing-masing memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan visi sekolah. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak pun mulai terbuka, karena adanya manajemen berbasis sekolah seakan mengharuskan setiap sekolah untuk melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk berkolaborasi dalam mengembangkan sekolah.

System pendidikan di Indonesia mengacu 3 kategori utama yakni, pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari Sekolah Dasar (6 tahun), Sekolah Menengah Pertama (3 tahun), Sekolah Lanjutan (SMA dan SMK selama 3 dan 4 tahun), dan pendidikan tinggi yakni perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Di Indonesia untuk masuk SD terutama untuk sekolah negeri ditentukan batas usia minimum, yaitu 7 tahun. Sementara untuk sekolah swasta tidak ada pembatasan usia. Begitu juga dengan pendidikan lanjutannya tidak dikenakan batasan usia minimum, yang terpenting telah menempuh pendidikan

sebelumnya dan maksimal 2 tahun ijazah terakhir masih bisa dipakai untuk mendaftar. Sementara untuk SMA dan SMK memiliki perbedaan lamanya pendidikan, untuk SMA hanya ditempuh 3 tahun sementara untuk SMK lama studi 4 tahun dengan rincian 3 tahun studi teori dan 1 tahun untuk praktik industry di tempat kerja. Kebijakan tentang perubahan lama studi baru saja ditetapkan 5 tahun terakhir. Untuk perguruan tinggi yang dimaksud sudah termasuk pilihan diploma atau jenjang strata 1. Umumnya strata 1 maksimal 5 tahun untuk perguruan tinggi negeri dan swasta 7 tahun. Sementara untuk diploma minimal 3 tahun dan maksimal 4 tahun lama studi. Jenjang pendidikan selanjutnya adalah Strata 2 dengan lama studi 2 – 3 tahun, dan Strata 3 dengan lama studi 3 – 5 tahun. Munculnya Undang undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disertai dengan terbitnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 memunculkan kebijakan baru dalam pengembangan kurikulum di tanah air. Pada pasal 38 ayat 1 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah”. Disebutkan pula pada ayat 2 bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervise dinas pendidikan atau Kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah”.

Dari dasar inilah maka kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dimana kerangka utamanya dibuat oleh pemerintah, tetapi kurikulum yang akan diterapkan di sekolah sekalipun pendidikan dasar diberikan kewenangan untuk mengembangkannya di tingkat satuan pendidikan. Konstitusi ini seklaigus juga menjamin adanya penyesuaian kurikulum dengan kondisi setiap sekolah yang tentunya berbeda-beda. Dalam konteks pendidikan dasar, kebutuhan untuk membuka ruang kreatifitas yang besar kepada setiap sekolah untuk mengembangkan seklaigus menentukan branding sekolah yang disesuaikan dengan kurikulum yang dibuat. Kebijakan pengembangan kurikulum ini diwarnai oleh semangat otonomi daerah, dimana sekalipun kurikulum itu ditunjukkan untuk mencapai tujuan nasional, hanya saja cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah.

Struktur kurikulum pada satuan pendidikan SD/MI didalamnya meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai kelas VI dan disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 8 mata pelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran pada Kelas IV sampai kelas VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Selain terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang keluasaan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi siswa, dalam struktur kurikulum pendidikan dasar terdapat muatan lain, yaitu muatan local dan kegiatan pengembangan diri. Muatan local adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata

pelajaran yang ada. Substansinya muatan local ditentukan oleh satuan pendidikan, seperti misalnya membatik, bahasa jawa, pendidikan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Negara Amerika Serikat yang merupakan negara terbesar ketiga di dunia tentu memiliki sistem pendidikan yang berkualitas, banyak dari perguruan tinggi amerika yang mampu memberikan psdm yang berkualitas di dunia kerja maupun pendidikan. dalam menjalankan proses pendidikan, halnya dengan Amerika Serikat yang lebih memberikan kebebasan Negara bagian untuk melaksanakan system pendidikan, sementara pemerintah pusat hanya merumuskan hal yang besar dalam pendidikan. Pendidikan dasar di tiga Negara memiliki perbedaan pada batasan usia minimum masuk sekolah dasar. Selain itu urutan system pendidikan ketiga Negara juga berbeda, serta jenjang dan jenis pendidikannya. Adapun dalam kurikulum, di Indonesia kurikulum dijabarkan dalam struktur kurikulum yang terpusat, dan pendidikan dasar diberikan 10 mata pelajaran belum ditambahkan dengan muatan local. Di Jepang, kurikulum pendidikan dasar didasarkan pada penanaman karakter dan kemandirian, sementara pelajaran ilmu pengetahuan umum hanya 4 mata pelajaran saja. Seementara di Amerika Serikat kurikulum pendidikan dasar lebih banyak mengajarkan softskill dan mata pelajaran umum yang berjumlah 4 mata pelajaran dan kemudian diturunkan dalam sub mata pelajaran yang bersifat penajaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Lee, S.-y., Graham, T., & Stevenson, H. W. (1996). Teachers and teaching: Elementary school in Japan and the United States. In T. P. Rohlen & G. K. LeTendre (Eds.), *Teaching and learning in Japan* (pp. 157-189). New York, NY, US: Cambridge University Press.
- Mayer, R. E., Tajika, H., & Stanley, C. (1991). Mathematical problem solving in Japan and the United States: A controlled comparison. *Journal of Educational Psychology*, 83(1), 69-72.
- Nawan Phuntsog. Pages 51-64 | Published online: 01 Jul 2010. Culturally Responsive Teaching: What do selected United States elementary school teachers think?
- Stevenson, Harold W. *The Elementary School Journal* Volume 92, Number 1 September 1991 : Japanese Elementary School Education.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemendikbud Republik Indonesia.
- Arief, A. S., Putri, S. E., Suroso, A., Syakhrani, A. W., & Rahmini, N. (2021). Digital Technology Management Challenges in Marketing Local Farm Products in Developing Countries: Analysis of International Publication Findings. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 96-107.
- Aslan, A. (2018). Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 115-124.

- Basir, A., Syakhrani, A. W., Wirawan, V., Harahap, A., & Widjaja, G. (2021). Support for Islamic Understanding from Families Information of Piety for The Millennial Generation. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 434-446.
- Ekasari, S., Manullang, S. O., Syakhrani, A. W., & Amin, H. (2021). Understanding Islamic Education Management in Digital Era: What Experts Say. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 127-143.
- Heryani, A., Br Sembiring, T., Fatmawati, E., Muhammadiyah, M. U., & Syakhrani, A. W. (2022). Discourse Postponing elections and extending the presidency: A study of political legality and the progress of Indonesia's democratic practice.
- Hifza, H., Antoni, A., Syakhrani, A. W., & Hartati, Z. (2020). The Multicultural Islamic Education Development Strategy on Educational Institutions. *Jurnal Iqra Jurnal Kajian Pendidikan*, 5(1), 158-170.
- Aslan. (2017a). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358>
- Aslan, A. (2016). Kurikulum Pendidikan Vs Kurikulum Sinetron. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(2), 135–148.
- Aslan, A. (2017b). NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM BUDAYA PANTANG LARANG SUKU MELAYU SAMBAS. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 11–20. <http://dx.doi.org/10.18592/jiu.v16i1.1438>
- Aslan, A. (2019). *HIDDEN CURRICULUM*. Pena Indis.
- Aslan, Hifza, Syakhrani, A. W., Syafruddin, R., & Putri, H. (2020). CURRICULUM AS CULTURAL ACCULTURATION. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.36526/santhet.v4i1.860>